

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di era modern sekarang ini, suatu institusi atau lembaga publik negara membutuhkan adanya sistem pemerintahan yang kuat dan juga bersih atau yang dikenal dengan *type of a clean or good govermance* (Putera, 2016). Adanya tuntutan seperti itu sehingga transparansi laporan keuangan kini semakin diperhatikan oleh negara berkembang, terutama Indonesia. Maksud tujuannya yaitu supaya masyarakat bisa melihat apa yang terjadi dan akan dikerjakan lembaga pemerintahan mengenai penggunaan anggaran yang ada dalam replika terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Saat ini aktivitas manajemen keuangan dalam pemerintah pusat dan daerah telah didukung dengan adanya teknologi informasi yang memadai dengan pemanfaatan hal tersebut dalam memenuhi kebutuhan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat terhadap adanya transparansi dan akuntabilitas pada informasi keuangan pemerintah dengan tujuan agar adanya tata kelola pemerintahan yang baik (Livana, 2020).

Pentingnya transparansi penyediaan informasi pada pelayanan sektor publik di Indonesia, hal ini didukung oleh keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Secara jelas undang-undang ini menjelaskan bahwa pemerintahan memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi publik secara transparan dengan tanggung jawab dan orientasi terhadap pelayanan masyarakat sehingga mudah untuk diakses cepat, efisien dan juga mudah dipahami masyarakat (Nosihana & Yaya, 2016). Pemanfaatan teknologi informasi dalam sektor pemerintahan melalui situs resmi yang dimiliki masing-masing pemerintah digunakan sebagai sarana dalam melakukan pengungkapan informasi keuangan melalui media internet atau disebut sebagai *Internet Financial Reporting* (IFR).

Praktik *Internet Financial Reporting* (IFR) digunakan juga sebagai sebuah salah satu perwujudan internet pemerintah dan kemudian terus dikembangkan dalam menyediakan dan juga untuk mengumumkan informasi mengenai beberapa laporan keuangan kepada semua pihak dan masyarakat (Sari, 2016). Dengan mempublikasikan laporan keuangan melalui media internet dapat meningkatkan motivasi pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang baik disamping dapat mengurangi biaya pelaporan yang tinggi. Hal ini dikarenakan internet dapat menjangkau masyarakat secara luas (Perdana, 2018).

Selain mempublikasikan laporan keuangan melalui internet yang seringkali dilakukan dengan memanfaatkan situs website resmi, pemerintah juga harus memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk melihat maupun mengunduh laporan keuangan. Kemudahan aksesibilitas IFR harus disediakan pemerintah untuk mengakomodasi tingginya awareness masyarakat terhadap kebutuhan informasi terkait pengelolaan keuangan yang telah dilakukan pemerintah selama ini. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap informasi keuangan pemerintah terlihat dari tingginya jumlah kunjungan (*visitor*) di beberapa situs website yang dimiliki pemerintah, serta banyaknya permintaan data terkait laporan keuangan pada situs PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) masing-masing daerah (Khasanah, 2017).

Berdasarkan *Open Budget Survey* 2019, Angka transparansi anggaran pemerintah Indonesia mengalami perbaikan. Skor keterbukaan anggaran Indonesia tahun 2019 naik menjadi 70 poin dari 64 poin per tahun 2017. Namun masih ada catatan penitng akan rendahnya angka partisipasi publik yaitu hanya sebesar 20 poin (<https://www.internationalbudget.org/>). Walaupun terjadi peningkatan keterbukaan informasi, akan tetapi masih ada sejumlah catatan yang bisa diperbaiki, di antaranya adalah keterbukaan proses pembuatan anggaran dan masalah tenggat waktu pelaporan. Seperti contoh dibawah ini Anggaran dan Belanja Pemerintah Daerah Tahun 2022 Kabupaten/ Kota di Pulau Sumatera yang ada di website:

**Tabel 1.1**  
**Informasi APBD Tahun 2022 di Website Kabupaten/ Kota Se-Sumatera**

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	APBD	
			Ya	Tidak
1	Aceh	23	14	9
2	Sumatra Utara	33	27	6
3	Sumatra Barat	19	15	4
4	Riau	12	9	3
5	Kepulauan Riau	7	5	2
6	Jambi	11	7	4
7	Bengkulu	10	6	4
8	Sumatra Selatan	17	12	5
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	3	4
10	Lampung	15	12	3
<b>Total</b>		<b>154</b>	<b>110</b>	<b>44</b>

Sumber: data diolah, 2022

Berdasarkan tabel I.1 transparansi keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota Kabupaten dan Kota di pulau Sumatera belum sepenuhnya transparan, dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ada di website hanya 110 Kabupaten/Kota yang menyediakan informasi terkait APBD tahun 2022, sisanya 44 Kabupaten/Kota yang belum memberikan informasi keuangan yang transparan. Maraknya kasus korupsi di Indonesia sebagian besar karena tersangkut masalah pengelolaan keuangan daerah yang tidak transparan. Salah satu contoh korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah baik itu Gubernur, Walikota/Bupati. Mantan Gubernur Sumatera Selatan terjerat korupsi pengelolaan dana hibah masjid sriwijaya Palembang dengan menggunakan dana APBD sebesar Rp 50 miliar pada tahun 2015 dan sebanyak Rp 80 miliar tahun 2017. Selain itu ada mantan Gubernur Riau yang terjerat kasus korupsi pengelolaan dana PON dan dana kehutanan, kerugian yang dicapai sebesar 9 miliar. Masih rendahnya tingkat transparansi informasi pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah daerah dengan memanfaatkan internet (IFR) di Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera, serta belum konklusifnya hasil penelitian sebelumnya menjadi motivasi bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait determinan yang dapat mempengaruhi IFR.

Dari data diatas, Fenomena terkait dengan internet financial reporting (IFR) adalah kurangnya partisipasi pemerintah daerah dalam transparansi pelaporan keuangan di website pemerintah daerah. Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah, Peraturan tersebut sebenarnya dibuat dan dirancang dalam hal mendorong daerah dalam hal untuk menyampaikan transparansi dari anggaran di website pemerintahan. Peraturan tersebut sebenarnya juga menyuruh para Gubernur untuk mengatutkan kepada para kepala daerah di wilayah masing-masing yang sebenarnya belum memiliki website dan kemudian pemerintah dari yang telah memiliki website resmi untuk berusaha menyiapkan menu dari konten yang disebut dengan nama Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD).

Salah satu yang mempengaruhi IFR adalah tingkat ketergantungan, tingkat ketergantungan pemerintah daerah dikarenakan dalam pelaksanaan pemerintahan, dengan tingginya tingkat ketergantungan pada dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat (dana alokasi umum) maka akan adanya pengawasan terhadap pemerintah daerah oleh pemerintah pusat. Sehingga, mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan mengenai informasi keuangan dalam situs resmi pemerintah daerah (Livana, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Puspita dan Martani (2012) yang menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan konten dalam website pemda. Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hendriyani dan Tahar (2015) dan Nurhidayati dan Wahasusmiah (2018) yang menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan informasi keuangan di internet.

Faktor yang kedua adalah opini audit, Opini audit merupakan salah satu indikator akuntabilitas kualitas dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP akan cenderung memberikan kemudahan akses IFR di website resmi untuk menunjukkan sinyal positif terhadap pengelolaan keuangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya,

jika pemerintah daerah mendapatkan opini audit selain WTP akan menimbulkan konotasi atau persepsi publik akan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga pemerintah daerah cenderung menutupi informasi keuangannya (Tisnawati, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Livana (2020) hasil penelitian yang menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh signifikan terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR) dalam website pemerintah daerah.

Faktor ketiga yaitu jumlah penduduk, menurut Livana (2020) jumlah penduduk yang besar akan mencerminkan kebutuhan yang besar pula akan layanan yang diberikan publik pada setiap daerah. Semakin banyak jumlah penduduk maka tekanan untuk meminta informasi dan pertanggungjawaban pemerintah daerah untuk pengungkapan LKPD terhadap masyarakat juga semakin besar, mengingat fungsi pemerintah adalah sebagai pelayan masyarakat. Penduduk merupakan sejumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil proses-proses demografi yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan (Rusli, 2011). Penelitian yang dilakukan oleh Verawaty (2018) dan Rahim dan Martani (2016) bahwa adanya hubungan positif antara jumlah penduduk terhadap pengungkapan informasi keuangan dalam website pemda.

Faktor selanjutnya adalah ukuran pemerintah, ukuran pemerintah daerah didasari pada besarnya aset yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah tersebut. Pemerintah daerah yang memiliki ukuran yang besar cenderung memiliki kekayaan yang besar pula (Trisanwati dan Achmad, 2015). Susiyah dkk. (2018) mengatakan bahwa ukuran pemerintah dapat dilihat dari besar atau kecilnya total aset yang dimiliki pemerintah. Sehingga untuk mengurangi anggapan tersebut pemerintah dapat melakukan publikasi laporan keuangan dengan memanfaatkan *e- government* karena merupakan media yang murah dan cepat. Pelaporan tersebut menggambarkan sifat transparansi dari pemerintah kepada masyarakat. Nosihana dan Yaya (2016) yang hasilnya mengatakan bahwa ukuran pemerintah daerah (*size*) berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan di *e-government*.

Faktor berikutnya adalah kekayaan pemerintah daerah, keberhasilan pemerintah daerah dalam kinerjanya dapat dilihat dari tingkat kekayaan daerah. Nosihana dan Yaya (2016) mengatakan jumlah pendapatan asli daerah (PAD) dapat mencerminkan kekayaan daerah. Sehingga pengelolaan potensi sumber daya yang dimiliki dapat dijadikan indikator kesuksesan pemerintah. Kekayaan pemerintah daerah merupakan sejumlah asset yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah yang saat ini sedang menjabat. Kekayaan pemerintah daerah berhubungan positif dengan meningkatnya pengungkapan karena dapat memberikan sinyal dari kualitas kepala daerah (Wau, 2015). Dalam penelitian Rahman dkk (2013) mengatakan bahwa kekayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap *Internet Financial Reporting* pemda di *e-government*.

Faktor yang terakhir adalah PRDB Per kapita, PDRB adalah jumlah yang muncul dari semua dari sektor perekonomian di sebuah wilayah. PDRB perkapita untuk melihat seberapa besarnya tingkat kemajuan dari masyarakat dalam suatu daerah (bps.go.id). Semakin besar pendapatan semakin besar pula permintaan. Pendapatan perkapita yang semakin tinggi akan menjadikan masyarakat melakukan monitoring politik yang akhirnya semakin tinggi pula sehingga keharusan yang diberikan untuk menyediakan informasi keada public juga akan menjadi semakin besar (Styles, 2007). Maka alasan tersebut memuat pelaporan dari keuangan dalam website. Penelitian yang dilakukan oleh Masra (2020) yang menyatakan bahwa PDRB perkapita berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR) pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hadiano (2020) menyatakan bahwa pendapatan per kapita tidak berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR).

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Livana (2020) dengan judul Determinan *Internet Financial Reporting* (IFR) Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2017-2018). Perbedaan penelitian dalam penelitian ini adalah terletak pada mengganti objek penelitian yaitu memperkecil objek penelitian menjadi Kabupaten/Kota Provinsi Lampung

tahun 2019-2020), serta menambahkan variabel yang sudah disarankan oleh penelitian sebelumnya, penulis menambahkan variabel PDRB Per Kapita, semakin tinggi tingkat sebuah kesejahteraan dalam masyarakat maka sebuah pengungkapan transparansi informasi keuangan, semakin tinggi pula permintaan informasi pada kinerja pemerintah daerah pada website pemerintah daerah (Masra, 2020).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka judul dalam penelitian ini adalah ***“Determinan Internet Financial Reporting (IFR) Dalam Website Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera Tahun 2019-2020)”***.

## **1.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Agar dalam penelitian ini tidak melebar atau meluas, adapun ruang lingkup penelitian ini adalah penelitian ini akan membahas mengenai determinan *Internet Financial Reporting (IFR)* dalam website pemerintah daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera Tahun 2019-2020. Variabel dependen yang digunakan adalah Indeks IFR sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat ketergantungan pemda, opini audit, jumlah penduduk, ukuran pemerintah daerah, kekayaan pemerintah, dan PDRB per kapita.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah tingkat ketergantungan pemda berpengaruh signifikan terhadap *Internet Financial Reporting (IFR)* dalam *website* pada pemerintah daerah?
2. Apakah opini audit berpengaruh signifikan terhadap *Internet Financial Reporting (IFR)* dalam *website* pada pemerintah daerah?
3. Apakah jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap *Internet Financial Reporting (IFR)* dalam *website* pada pemerintah daerah?
4. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap *Internet Financial Reporting (IFR)* dalam *website* pada pemerintah daerah?

5. Apakah kekayaan pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR) dalam *website* pada pemerintah daerah?
6. Apakah PDRB per kapita berpengaruh signifikan terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR) dalam *website* pada pemerintah daerah?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu,

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh tingkat ketergantungan terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR) dalam *website* pada pemerintah daerah.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh opini audit terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR) dalam *website* pada pemerintah daerah.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh jumlah penduduk terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR) dalam *website* pada pemerintah daerah.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR) dalam *website* pada pemerintah daerah.
5. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kekayaan pemerintah daerah terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR) dalam *website* pada pemerintah daerah.
6. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh PDRB per kapita *Internet Financial Reporting* (IFR) dalam *website* pada pemerintah daerah.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Melalui tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan untuk dapat menjadi referensi ataupun acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai pelaporan keuangan



pemerintah daerah dan dapat mengembangkan berbagai penelitian yang sudah ada, terkhusus pada *Internet Financial Reporting* (IFR).

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah, diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan dapat memberikan masukan bagi pemerintah mengenai transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan melalui internet.
- b. Bagi Pengguna Laporan Keuangan, diharapkan pemerintah dapat lebih memperhatikan masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan dari aspek layanan dalam menyajikan laporan keuangan melalui media internet. Agar masyarakat lebih mudah dalam mengawasi pengelolaan keuangan pada sektor pemerintah.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdapat lima bab dalam sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada penelitian ini, bab I merupakan bab utama yang dimana berisi mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab II merupakan bab yang didalamnya menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan pengaruh variabel-variabel yang akan diuji dalam penelitian.

#### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, bab III menjelaskan mengenai metode yang digunakan pada penelitian, yaitu populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, dan metode analisis data.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab IV berisi mengenai perhitungan yang dilakukan dalam penelitian, hasil dari analisis data, beserta pembahasan mengenai variabel yang telah dilakukan pengujian.

#### **BAB V KESIMPULAN**

Bab V dalam penelitian ini merupakan sebagai bab penutup yang didalamnya menunjukkan adanya kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan pemberian saran yang ditujukan untuk peneliti selanjutnya

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**